

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, dunia pendidikan pada umumnya sedang menghadapi berbagai tantangan. Antara lain globalisasi dibidang budaya, etika dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi dibidang transportasi dan informasi, diberlakukannya globalisasi dan perdagangan bebas yang berarti persaingan alumni dalam pekerjaan semakin ketat, hasil-hasil survey internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah atau bahkan selalu ditempatkan dalam posisi juru kunci jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan masalah rendahnya tingkat *social-capital*. Inti dari sosial capital adalah trust (sikap amanah).

Dengan mempelajari dan melihat fakta-fakta di SMAN 5 Bandung seperti halnya dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi siswa dan peranan PKn dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi seperti yang diungkapkan Sundawa (2011), ketidak matangan, ketidak dewasaan, dan ketidak arifan warga negara dalam mengimplementasikan demokrasi tidak terlepas dari kurang berhasilnya penanaman nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan. Untuk mencapai tujuan peranan PKn dalam menumbuhkan nilai-nilai demokratis siswa perlu dipersiapkan dan diterapkan dengan maksimal dalam menumbuhkan nilai-nilai demokratis, karena pendidikan kewarganegaraan didesain sebagai upaya mempersiapkan warga negara agar mampu berpartisipasi aktif secara politik dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Bahkan terkait dengan nilai demokratis, Zamroni (ICCE, 2003) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

Selain itu internalisasi nilai-nilai demokrasi dapat diarsipkan dalam kegiatan KBM misalnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan juga tidak menutup kemungkinan menanamkan materi demokrasi pada mata pelajaran yang lain.

Contohnya SAINS dengan memberikan pengetahuan berbasis lingkungan, sehingga tertanam sikap kecintaan terhadap alam. Praktek pembelajaran dilakukan dengan materi yang substansial (konsep teori yang sangat selektif) tetapi kaya dalam implementasi. Dimasa lalu pendidikan demokrasi tidak berkembang. Hal inidapat dicontohkan pada kasus PPKn/PKn yang sebelumnya dikembangkan secara indoktrinas, mengakumulasi pengetahuan yang kurang bermakna, bersifat hegemoni, tidak partisipatoris dan sering dikritik anti realitas. Seharusnya PKn memuat nilai-nilai pluralisme dan membentuk karakter bangsa, sehingga PKn harus menerapkan pendidikan multikultural (proses transformasi cara hidup menghormati, toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup dalam masyarakatnya yang plural, tanpa diskriminasi) Azra (2002 hal. 159).

Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia dan internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Dengan kata lain perpektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan global yang lebih luas.

Dalam cara berpikir, seseorang harus berpikir global dan dalam bertindak dapat secara lokal (think globally and act locally). Sebagai pendidik guru memerlukan suatu pendekatan yang akan menolong siswa untuk mengarahkannya kepada kehidupan yang kompleks dan menjauhi pengertian yang sempit tentang ruang, ras, agama, suku, sejarah dan kebudayaan. Istilah-istilah dan pemahaman-pemahaman yang sempit seperti kesukuan, kedaerahan, barat-timur, putih-hitam dapat memunculkan benih-benih konflik sehingga memunculkan pertentangan dunia. Oleh karena itu, guru harus menanamkan nilai-nilai yang baik kepada siswa dan pemahaman bahwa kehidupan orang lain dan diri sendiri adalah merupakan dari kehidupan dunia.

Pendidikan global merupakan upaya sistematis untuk membentuk wawasan dan perspektif siswa, karena melalui pendidikan global siswa dibekali materi secara utuh dan meyeluruh berkaitan dengan masalah global. Pendidikan global menawarkan suatu makna bahwa kita hidup didalam masyarakat dimana kita saling terhubung baik suku,

bangsa dan batas negara tidak menjadi penghalang dan merupakan komunitas dari perbedaan di antara orang-orang yang berbeda bangsa. Pendidikan global mempersiapkan siswa untuk memahami dan mengatasi adanya ketergantungan global dan keberagaman budaya yang mencakup hubungan, kejadian dan kekuatan yang tidak dapat diisikan dalam batas-batas negara dan budaya. Hoopes, 1997, pendidikan global memiliki tiga tujuan yaitu:

1. Memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Tujuan ini dapat dicapai melalui mengajarkan bahan dan menggunakan metode yang memberikan relativisme budaya.
2. Memberikan pengalaman yang mempersiapkan siswa untuk mendekati diri dengan keragaman global. Kegunaan dari tujuan ini adalah untuk mendiskusikan tentang relativisme budaya dan keutamaan etika.
3. Memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir tentang mereka sendiri sebagai individu, warga negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam era global, pendidikan nasional harus memperhatikan perkembangan yang terjadi secara internasional, maka kajian kompetensi guru sebagai unsur pokok dalam penyelenggaraan pendidikan formal perlu pula mempertimbangkan bagaimana kompetensi guru dibina dan dikembangkan. Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu memperhatikan bahwa siswa memiliki berbagai potensi dalam dirinya.

Negara yang memiliki peran membentuk warga negaranya menjadi *good and smart citizen* harus berupaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan global. Agar peserta didik sebagai warga negara muda memiliki pemahaman, keterampilan dan daya saing yang terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dunia maka salah satu pilihannya menyiapkan mereka melalui berbagai upaya, baik pendidikan di sekolah maupun diluar sekolah (Wahab dan Sapriya, 2012: 236). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan pendidikan warga negara global dengan pendidikan kewarganegaraan sehingga peserta didik diharapkan memiliki wawasan yang terbuka

ketika dihadapkan dengan permasalahan konflik, lingkungan dan permasalahan lainnya baik dari tingkat lokal, nasional dan internasional (Wahab dan Sapriya, 2012 :236).

Melalui pendidikan nilai demokrasi dapat ditanamkan kepada siswa. Di sekolah nilai-nilai demokrasi dikembangkan dalam kurikulum pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan beserta seperangkat sarana dan prasarannya yang mendukung seperti materi, buku-buku, strategi, metode dan alat evaluasi. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran sebagai wahana dalam mengembangkan dan menanamkan nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dan dilaksanakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu upaya membentuk manusia Indonesia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi yang mampu mewujudkan dan melaksanakan pembangunan masyarakat demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan menduduki tempat yang sangat sentral dan strategis dalam pendidikan nasional. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan konskuensi dari pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha sadar untuk merealisasikan nilai-nilai demokrasi, usaha-usaha yang dilaksanakan secara terarah dan terencana yang dituangkan dalam kurikulum sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Penanaman nilai demokrasi pada siswa tidak hanya dengan mengalihkan nilai demokrasi saja, tetapi juga mengembangkannya pada diri siswa sehingga terbentuk pribadi dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai demokrasi. Pengembangan nilai yang dimaksud agar siswa dapat mencerna melalui akalnyanya dan menumbuhkan rasionalitas sesuai dengan kemampuannya tentang nilai demokrasi sehingga siswa mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin.

Dengan demikian menumbuhkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa perlu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sebagai penerus bangsa mampu melaksanakan pembangunan masyarakat yang demokratis. Pengembangan demokrasi adalah materi yang menginformasikan, menanamkan, mengembangkan serta

mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi agar dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata.

Mata pelajaran PKn merupakan pendidikan yang wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan termasuk jenjang perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang baru No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia sehingga memiliki wawasan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang menandai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan menanamkan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan.

Civic Education oleh banyak ahli diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewargaan. Istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili oleh Azyumardi Azra dan ICCE (*Indonesia Center for Civic Education*) UIN Jakarta yang merupakan penggagas pertama setelah lengsernta Orde Baru. Sedangkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili oleh Zamroni, Muhammad Numan Soemantri dan Udin S. Winataputra. Sebagian ahli menyamakan *civic education* dengan Pendidikan Demokrasi (*Democracy Education*) dan Pendidikan HAM. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan guru sebagai tenaga kependidikan dan siswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Hal lain yang menjadi titik tekan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis dan beradab, dengan pengertian sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan menjadi bagian warga dunia (*global society*).

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis melalui pengembangan dan pembiasaan dalam kehidupan warga sehingga menjadi budaya demokrasi. Muhaimin (2002, hal.11) memberikan penjelasan bahwa nilai yang penting dalam demokrasi seperti : kemauan melakukan kompromi, bermusyawarah berdasar asas saling dan ketundukan kepada rule of law yang akhirnya menjamin terlindungnya hak asasi tiap-tiap manusia Indonesia. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi perlu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nurcholis Madjid dalam tim ICCE UIN Jakarta (2003) menyatakan adanya tujuh norma atau pandangan hidup demokrasi sebagai berikut : kesadaran akan pluralisme, prinsip musyawarah, adanya pertimbangan moral, pemufakatan yang jujur dan adil, penemuan segi-segi ekonomi, kerjasama antar warga, serta pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dalam sistem pendidikan.

Sekolah merupakan lembaga untuk melaksanakan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi disekolah dilaksanakan dengan melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam berbagai kegiatan sekolah, baik kegiatan intrakurkuler maupun ekstrakurikuler. Salah satu cara pengembangan nilai-nilai demokrasi yaitu melalui proses pendidikan demokrasi. Proses pendidikan demokrasi dapat melahirkan manusia yang demokratis yang memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa masyarakat demokratis dapat memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan secara baik dan benar. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Zamroni (2011 : 39), pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis. Tanpa manusia-manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat demokratis hanya merupakan impian belaka. Kehidupan masyarakat demokratis harus didasarkan pada kesadaran warga bangsa atas ide dan cita-cita demokrasi yang melahirkan kesadaran dan keyakinan bahwa hanya dalam masyarakat demokratislah dimungkinkan warga bangsa untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan.

Demokrasi sebagai faham kebebasan yang mendunia, telah merambah ke lembaga pendidikan sekolah. Demokrasi yang sering dipahami oleh sebagian masyarakat adalah

kebebasan, dimana kebebasan yang sebeb-bebasnya tanpa memikirkan efek dari sebuah kebebasan yang mereka lakukan akan berdampak negatif. Untuk menyikapi masalah pemahaman terhadap demokrasi yang salah tersebut maka perlunya sebuah kedewasaan dan kematangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Karena kematangan dan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi sangat penting karena akan memberikan arahan dan pemaknaan demokrasi secara benar dan tepat sasaran.

Pendidikan dewasa ini harus bisa berfungsi ikut membangun kapasitas bangsa sebagai manusia pembelajar, sehingga bisa handal dan percaya diri dalam percaturan global sekarang serta rancangan ke masa depan. Dalam konteks ini, bukan hanya kukuh dalam visi serta cita etis pendidikan yang humanis dan religius, melainkan juga pendidikan mempunyai daya dan tata kelola untuk memperkaya kehidupan yang demokratis.

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 mencapai angka 72,11 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI tahun 2016 yang capaiannya sebesar 70,09. Dengan kondisi perubahan tersebut, tingkat demokrasi Indonesia masih berada dalam kategori “sedang”. Indeks Demokrasi Indonesia 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari tiga aspek, yaitu aspek kebebasan sipil yang bernilai 78,75; aspek hak-hak politik yang bernilai 66,63; dan aspek lembaga demokrasi yang bernilai 72,49. Dibanding 2016, aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi tahun 2017 mengalami peningkatan. Disisi lain, aspek hak-hak politik pada tahun 2017 mengalami penurunan.

Pada tahun 2017, sebanyak enam variabel mengalami peningkatan dan empat variabel mengalami penurunan. Sementara itu, satu variabel tidak mengalami perubahan, yaitu variabel pemilu yang bebas dan adil. Dari enam variabel yang meningkat, peningkatan tertinggi terjadi pada variabel peran partai politik yakni sebesar 19,35 poin; diikuti oleh variabel peran DPRD yakni sebesar 13,02 poin. Peningkatan tertinggi ketiga terjadi pada peran Birokrasi Pemerintahan Daerah, yakni sebesar 8,75 poin.

IDI bertujuan untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi. dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi ssesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Disamping level nasional IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah. (Indeks Demokrasi Indonesia, 2017).

Pengembangan nilai-nilai demokratis disekolah juga perlu diterapkan untuk menghadapi era globalisasi yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Itu artinya, dunia pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang demokratis sehingga memiliki resistence yang kokoh di tengah-tengah konflik peradaban.

Dalam dunia pendidikan diperlukan pendidikan demokrasi sebagai bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi pada peserta didik tentang bagaimana kewajiban dan hak serta kebebasan berpendapat dengan saling menghargai satu sama lainnya. Pendidikan demokrasi terbagi menjadi tiga :

1. Pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi, serta studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa bagaimana agar mencintai negara dan bangsa. Pendidikan formal biasanya dilakukan disekolah dan diperguruan tinggi.
2. Pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan dirumah ataupun masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi. Selain itu, sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya yang langsung dirasakan hasilnya.

3. Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang melewati tahap diluar lingkungan masyarakat. Pendidikan ini lebih makro dalam berinteraksi sebab pendidikan diluar sekolah mempunyai variabel ataupun parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang.

Perlu disadari bersama bahwa globalisasi bukanlah suatu proses alami melainkan suatu proses yang dimunculkan berdasarkan gagasan, yang selanjutnya ditawarkan kepada dunia untuk diikuti oleh bangsa lain. Dengan demikian, globalisasi yang telah menghasilkan kesepakatan bersama sangat syarat dengan muatan kepentingan dan keuntungan bagi yang menciptakan. Banyak gejala globalisasi ditandai oleh ambivalensi, yaitu tampak sebagai “berkah” disatu sisi tetapi sekaligus menjadi “kutukan” disisi lain. Ciri ambivalensi seperti ini dalam globalisasi adalah persoalan sentral yang maha penting. Disitu terletak locus problematicus yang menyimpan tantangan besar bagi pendidikan sekolah (Tanje, 2008).

J. Soedjati Djiwandono dalam makalahnya mengenai "Globalisasi dan Pendidikan Nilai" (dalam Sindhunata, 2001:105) mengemukakan bahwa Negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia kini bukan saja saling terbuka satu sama lain, tapi juga saling tergantung satu sama lain, walaupun ketergantungan itu akan senantiasa bersifat asimetris, artinya satu negara lebih tergantung pada negara lain daripada sebaliknya.

Karena saling ketergantungan dan keterbukaan ini tidak simetris, pengaruh globalisasi atas berbagai negara juga berbeda kadarnya. Negara-negara berkembang akan cenderung lebih terbuka pada pengaruh globalisasi dari pada negara-negara industri maju, karena ketergantungan kelompok negara-negara pertama pada kelompok negara kedua yang memiliki kemampuan ekonomi, sumber daya manusia, dan teknologi. Demikian juga negara-negara maju akan bertindak sebagai pelaku atau subjek, sedangkan kelompok negara berkembang lebih sebagai sasaran atau objek globalisasi.

Untuk menjawab peluang kehidupan global, diperlukan paradigma baru pendidikan. H.A.R Tilar (2000:19-23) mengemukakan pokok-pokok paradigma baru pendidikan sebagai berikut :

- a. Pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang demokratis.

- b. Masyarakat demokratis memerlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis.
- c. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah lakuyang menjawab tantangan internal dan global.
- d. Pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis.
- e. Didalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan berkompetisi didalam rangka kerjasama.
- f. Pendidikan harus mampu mengembangkan kebhinekaan menuju kepada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatu diatas kekayaan kebhinekaan masyarakat.
- g. Yang paling penting, pendidikan harus mampu meng-Indonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia merasa bangga menjadi warga negara Indonesia.

Paradigma baru pendidikan di atas mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak lagi dipikulkan kepada sekolah, akan tetapi dikembalikan kepada masyarakat dalam arti sekolah dan masyarakat sama-sama memikul tanggung jawab. Dalam paradigma baru ini, masyarakat yang selama ini pasif terhadap pendidikan, tiba-tiba ditantang menjadi penanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab ini tidak hanya sekedar memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah dan membayar uang sekolah, akan tetapi yang lebih penting masyarakat ditantang untuk turut serta menentukan jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk meningkatkan mutu pendidikan dan memikirkan kesejahteraan tenaga pendidik agar dapat memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik.

1.2 Rumusan Masalah

Pengembangan nilai-nilai demokratis disekolah perlu diterapkan untuk menghadapi era globalisasi yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Dunia pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang bermutu harus menyiapkan generasi yang demokratis sehingga memiliki resistance yang kokoh di tengah-tengah konflik peradaban.

1. Bagaimana peran guru PKn dalam menumbuhkan nilai-nilai demokratis siswa melalui perspektif global di SMAN 5 Bandung ?

2. Apa yang menjadi kendala guru PKn dalam menumbuhkan nilai-nilai demokratis siswa melalui perspektif global di SMAN 5 Bandung ?
3. Bagaimana upaya guru PKn dalam menumbuhkan nilai-nilai demokratis siswa melalui perspektif global di SMAN 5 Bandung ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan menganalisis secara objektif sehingga dapat mendeskripsikan dengan jelas tentang peranan pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan nilai-nilai demokratis siswa berbasis perspektif global.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui peran guru PKn dalam menumbuhkan nilai-nilai demokratis siswa melalui perspektif global di SMAN 5 Bandung.
2. Mengetahui kendala guru PKn dalam menumbuhkan nilai-nilai demokratis siswa melalui perspektif global di SMAN 5 Bandung.
3. Mengetahui upaya guru PKn dalam menumbuhkan nilai-nilai demokratis siswa melalui perspektif global di SMAN 5 Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu terutama mengenai menumbuhkan nilai-nilai demokratis siswa melalui perspektif global. Diharapkan juga pada pengembangan teori peranan sekolah dalam menumbuhkan nilai-nilai demokratis siswa, maka pengertian-pengertian maupun konsep-konsep yang dapat diterapkan dan dikembangkan dalam upaya mewujudkan pengetahuan siswa yang mendalam terhadap nilai-nilai demokratis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan peranan sekolah dalam menumbuhkan nilai-nilai demokratis siswa melalui perspektif global.
2. Untuk memberi masukan kepada sekolah agar menumbuhkan nilai-nilai demokratis siswa melalui perspektif global lebih ditingkatkan lagi.
3. Bagi peneliti, sebagai bahan penelitian lanjutan terhadap masalah yang relevan.